

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NURSADIQAH APRILIANI SALAM



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURSADIQAH APRILIANI SALAM
A31111293**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NURSADIQAH APRILIANI SALAM
A31111293

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 29 Agustus 2016

Pembimbing I



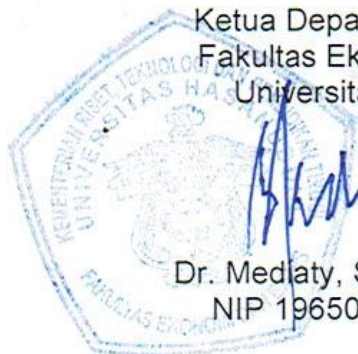
Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP 19630210 199002 1 001

Pembimbing II



Drs. Muh. Nur Azis, M.M.
NIP 19601231 198811 1 004

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NURSADIQAH APRILIANI SALAM
A31111293

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal **20 Oktober 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA	Ketua	1 
2.	Drs. Muh. Nur Azis, M.M.	Sekretaris	2 
3.	Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4.	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Anggota	4 
5.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	5 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nursadiqah Apriliani Salam

NIM : A31111293

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Nursadiqah Apriliani Salam

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam, Sang Pemilik dan Pemberi Pengetahuan. Sudah sepantasnyalah manusia yang rendah ini mengucapkan segala syukur kepada-Nya karena tanpa nikmat-Nya, dan tanpa rahmat-Nya, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kinerja Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Penyusunan skripsi diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dengan selesainya skripsi ini, maka sudah sepantasnya peneliti menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan dan hanya atas rahmat dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua peneliti, H. Abd. Salam Sewai, S.E., dan Hj. Madyana Tulele. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan bantuan doa, kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran selama ini. Terima kasih juga untuk saudara dan saudari Kiki, Anti, Mamat, Mita dan Lisa yang selalu mendorong dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Asri yang membantu menyelesaikan masalah laptop, yang peneliti gunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Muh. Nur Azis, M.M., selaku Dosen

pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan peneliti hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA, selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih atas bantuannya kepada peneliti.
6. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA, selaku penasihat akademik atas bimbingan dan arahan selama kuliah
7. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA, Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA, selaku penguji atas kritik, saran dan bimbingannya kepada peneliti.
8. Seluruh dosen dan staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuannya.
9. Keluarga besar I11INOIS Jerry, Atthariq, Sri Rahayu, Inge, Raisa, Febi, Ifar, Myla, Byna, Fafa, Cici, Echa, Rijal, Dayat, Nurul, Nona, Dani, Riska, Rijal, Azriel, Ayu Anisman, Nuwa atas doa dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabatku “Bacriedth” Dhira, Wiwin, Cabhy, Vivi, Aya, Icha, Aisah, Izza, Yayank, Agung S, Agung T, Abi, Sadam, Echa, Cako, Ai, Abil atas doanya selama ini dan memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Fachruddin, S.E yang telah banyak memberikan bantuan, doa dan dorongannya selama ini.
11. Teman-teman KKN Gelombang 87 Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Endrekang Dani, Gita, Fitri, Nanang, Ashar, Mikha. Terima

kasih juga untuk Bapak Kepala Desa Syukur, S.IP., dan Bapak Supervisor Achmad Colli, S.H., M.H.

12. Pimpinan dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang memberikan izin penelitian bagi peneliti.
13. Keluarga besar Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. SEMA FE-UH, Himajie FE-UH, Immaj FE-UH, dan IMA FE-UH.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Oleh sebab itu, diharapkan bagi peneliti yang akan datang untuk dapat mengembangkan lagi skripsi ini.

Makassar, 29 Agustus 2016

Peneliti,

Nursadiqah Apriliani Salam

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

SYSTEM ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX WITH THE REVENUE PERFORMANCE IN DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR

Nursadiqah Apriliani Salam
Syarifuddin
Muh. Nur Azis.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kinerja pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jenis data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapang. Alat analisis yang digunakan Analisa Deskriptif dan Analisa Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian diperoleh (1) Naik turunnya Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar dipengaruhi oleh Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 89 persen. (2) Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar.

Kata Kunci: Sistem Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kinerja.

The aim of this research is to understand and analyzed the land and building tax with revenue performance in Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. The research was using qualitative data and quantitative data. The source based on primary and secondary data. The collection technique based on literature and survey. Analysis devices used Descriptive Analysis and Simple Linier Regression Analysis with SPSS 21 program. The outcome of this research (1) The tendency of increasing and decreasing revenue performance in Dinas Pendapatan Kota Makassar was affected by land and building tax about 89% (percent). (2) Land and building tax system has huge significant impact of revenue performance Dispenda Kota Makassar.

Keywords: Collection system, Land and Building Tax, Performance.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 <i>Goal-Setting Theory</i>	7
2.2 Pengertian Sistem	8
2.3 Pajak	8
2.3.1 Pengertian Pajak.....	8
2.3.2 Fungsi Pajak	10
2.3.3 Asas Pemungutan Pajak	10
2.3.4 Cara Pemungutan Pajak	11
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.4 Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.4.1 Ciri-ciri Pajak Daerah	13
2.4.2 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah	13
2.4.3 Asas Pemungutan Pajak Daerah	13
2.4.4 Tolak Ukur suatu Pajak Daerah	14
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan	14
2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
2.5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.5.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan PBB.....	19
2.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	20
2.7 Sumber Pendapatan Asli Daerah	22
2.8 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.9 Kinerja Manajerial	26

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	34
4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	35
4.3 Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar	35
4.4 Bagan Struktur Organisasi	36
4.5 Hasil Penelitian	38
4.6 Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
4.1 Perimaan Pedapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013	48
4.2 Perimaan Pedapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014	48
4.3 Perimaan Pedapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	49
4.4 Data Hasil Kuesioner	50
4.5 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	52
4.6 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
4.1 Bagan Struktur Dinas Pendapatan Daerah	37
4.2 Arus Dokumen	44
4.3 Alir Sistem Penagihan Pajak	46
4.4 Normal Probability Plot	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Biodata	60
2. Koesioner	61
3. Tabulasi Responden untuk Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	65
4. Tabulasi Responden untuk Kinerja Pendapatan Dispenda	66
5. Data Regresi Linear Sederhana.....	67
6. Hasil SPSS 21	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Negara Indonesia menuntut pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik ini digunakan untuk mendorong pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sendiri. Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pun mencari berbagai sumber penerimaan kas negara untuk digunakan membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Ada beberapa sumber penerimaan kas negara salah satunya adalah penerimaan kas negara yang bersumber dari pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan awal munculnya otonomi daerah. Dengan begitu pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk menggali sumber penerimaan yang dapat diperolehnya. Munculnya Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah maka wewenang pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah.

Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Diperlukan evaluasi mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan saat ini agar pada saat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sepenuhnya ditangani oleh Kota Makassar sudah lebih baik dari sebelumnya.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Rahman, 2011:41).

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Di samping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat maka dirubahlah sistem pemungutan pajak yang semula *Official Assesment* menjadi sistem *Self Assesment*. Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Tujuan sistem tersebut diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk itu kantor pajak dianggap perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terdapat tunggakan lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul skripsi **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kinerja Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah: “Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kinerja pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka dikemukakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis

sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kinerja pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai peralihan pajak bumi dan bangunan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan kota, dan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Kota Makassar yaitu sebagai masukan dan bahan informasi dalam rangka peningkatan sistem pemungutan pajak di Kota Makassar

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh kerangka penulisan, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai *Goal-Setting Theory*, pengertian sistem; pajak, mencakup: pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak; kemudian pengertian pajak daerah mencakup: ciri-ciri pajak daerah, prinsip pemungutan pajak daerah, asas pemungutan pajak daerah, dan tolak ukur suatu pajak daerah; selanjutnya membahas tentang pajak bumi dan bangunan mencakup pengertian pajak bumi dan bangunan, obyek pajak bumi dan bangunan, subyek pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan dan tarif pajak bumi dan bangunan, dasar hukum pemungutan PBB; selanjutnya membahas tentang pengertian pendapatan asli daerah, sumber pendapatan asli daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, dan kinerja manajerial.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari: sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, struktur organisasi Dispenda Kota Makassar, bagan struktur organisasi, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Goal-Setting Theory*

Penelitian ini menggunakan *Goal-Setting Theory* yang dikemukakan oleh Locke (1968) sebagai teori utama (*grand theory*). *Goal-Setting Theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. *Goal-Setting Theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. *Goal-Setting Theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins, 2008). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Secara keseluruhan, niat dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan, merupakan motivasi yang kuat dalam mewujudkan kinerjanya. Individu harus mempunyai keterampilan, mempunyai tujuan dan menerima umpan balik untuk menilai kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh terhadap perilaku pegawai dan kinerja dalam organisasi (Locke and Latham dalam Lunenburg, 2011).

Locke dalam Kusuma (2013) menemukan bahwa *goal-setting* berpengaruh pada ketepatan anggaran. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/

program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi. Berdasarkan pendekatan *Goal-Setting Theory* keberhasilan pegawai dalam mengelola anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan variabel kompensasi, lingkungan kerja dan komitmen organisasi sebagai faktor penentu. Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

2.2 Pengertian Sistem

Kata sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 950).

“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu” (Mulyadi, 2010: 2). Dalam pengertian yang lain oleh Hall (2001: 5) mengemukakan bahwa “sistem adalah sekelompok atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*interrelated*) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*common purpose*)”.

Pengertian lainnya yang dikemukakan oleh Baridwan (2012:3) bahwa “sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Nariana dkk, (2013: 9):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Nariana dkk, (2013: 10) menemukan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak menurut Rohmat Sumitro dalam Suandy (2005: 5)

“Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”.

Pengertian Pajak menurut NJ. Feldmann yang dikutip Waluyo (2007:21)

adalah “prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata untuk menutup pengeluaran-pengeluaran secara umum”.

Adapun penjelasan yang dikemukakan Soeparman Soemidjadja dalam

Burton dan Wirawan (2007: 65) mengenai pajak, ialah “iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

M.J.H.Smeets dalam Suandy (2005: 7) menjelaskan:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.3.2 Fungsi Pajak

Selanjutnya, menurut Suandy (2005: 8) terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain:

“Fungsi *Budgetair*, fungsi *Regulerend*, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Fungsi *Budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; (2) Fungsi *Regulerend*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi; (3) Fungsi Sosial, Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan setinggi-tingginya setelah dikurangi kebutuhan primer; (4) Fungsi Demokrasi, pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat; (5) Fungsi Redistribusi, pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk penegakan keadilan sosial. Makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka makin kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajaknya.

2.3.3 Asas Pemungutan Pajak

Waluyo (2007: 22) mengemukakan bahwa: “Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asas pemungutan pajak”. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: (1) *Equality*, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) *Certainty*, penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenag. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran; (3) *Convenience*, kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak; (4) *Economy*, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.

2.3.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Zain (2007: 73) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan dua stelsel, yaitu:

Stelsel nyata dan stelsel anggapan. (1) *Stelsel nyata (rill stelsel)*, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan setelah pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui); (2) *Stelsel Anggapan (fictive stelsel)*, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh perundang-undangan, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2005: 9) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem pemungutan pajak:

(1) *Official Assement system* adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya; (2) *Semi Self Assement System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak yang terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal; (3) *Full Self Assement System*, suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan fiskus; (4) *Witholding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh fiskus maupun wajib pajak itu sendiri.

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak

Resmi (2007: 33) mengungkapkan agar tercapai keadilan dan kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak perlu memperhatikan beberapa syarat-syarat, yaitu:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya mengabdikan pada keadilan, baik keadilan dalam prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Keadilan bersifat relatif, maka dalam menentukan keadilan dalam bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat; (b) Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama atau sederajat.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.

3. Syarat Ekonomis

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Syarat ekonomis ini sejalan dengan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat dan membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasional.

4. Syarat Finansial

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan sebagian untuk menutup pengeluaran negara.

2.4 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2006: 12) pajak daerah adalah:

luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.4.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud menurut Koswara (2001: 18) adalah sebagai berikut:

- (a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- (b) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- (c) *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

2.4.2 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Sugiyanto (2008: 9) menjelaskan pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah tersebut yaitu:

- (a) Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu;
- (b) Prinsip Kepastian, pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri;
- (c) Prinsip Kecocokan, pajak jangan sampai menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah.

2.4.3 Asas Pemungutan Pajak Daerah

Koswara (2001:19) menjelaskan dalam pemungutan pajak daerah harus terdapat azaz-azaz pemungutan pajak daerah. Azaz pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- (a) Harus ada kepastian hukum;
- (b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong;
- (c) Masalah pajak harus jelas;
- (d) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan bagi seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

2.4.4 Tolak Ukur suatu Pajak Daerah

Menurut Ismail (2007: 7), untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan ukuran yang dapat menjadi tolak ukur pajak daerah adalah:

- (a) Hasil (*Yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan;
- (b) Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pula. Pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat;
- (c) Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
- (d) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*), dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah.

Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah:

luran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak”. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009:749) pengertian PBB adalah:

luran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan dengan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Menurut Suprianto (2011) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)”. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Prawoto (2011:43) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah “pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

2.5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

Bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan TOL;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal;
- g. Dermaga;
- h. Taman mewah;
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
- j. Pipa minyak.

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Menurut Mardiasmo (2009: 311), Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

Bumi dan atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan menurut pasal 77 ayat (3) Undang-undang Pajak Daerah Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakal, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan peraturan menteri keuangan.

2.5.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2009: 473) Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah: “orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau; memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau; memperoleh manfaat atas bangunan”.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 UUPBB adalah “orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagaimana dimaksudkan diatas adalah terdiri dari orang atau badan yang:

- a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:
 - 1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;
 - 2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan
 - 3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).
- b. Menguasai bumi dan atau bangunan:
 - 1) Menguasai bumi (tanah) saja;
 - 2) Menguasai bangunan saja; dan
 - 3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;
- c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:
 - 1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;
 - 2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan
 - 3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan

Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Pemilik;
- b. Pemegang kekuasaan;
- c. Penyewa atau sebagainya.

Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini disebut wajib pajak.

Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, UUPBB memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. sebagai keseimbangan, UUPBB memberikan hak kepada subjek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan

keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan sejak diterimanya surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan surat keputusan disertai dengan alasan-alasannya (Pasal 4 UUPBB).

2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dasar perhitungan besarnya PBB terutang tidak menggunakan NJKP, melainkan hanya NJOP, inilah yang membedakan dasar perhitungan PBB terutang antara UU lama (UU No. 12 Tahun 1994) dan UU yang baru (UU No. 28 Tahun 2009).

2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan PBB

1. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui lagi dengan UU no 28 tahun 2009.
3. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak.

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual
6. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

2.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah <http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 April 2015. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu

dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.7 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah (Sonny Lazio, 2012), yaitu:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.8 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006: 123) mendefinisikan “kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. “Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi” (Hamzah, 2008: 8). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008: 21) mengungkapkan bahwa “kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan”. “Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan” (Westin, 1998: 31).

“Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan *efisiensi*, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik” (Halacmi, 2005: 19). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. “Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang” (Bastian, 2006).

Penelitian yang dilakukan Mandell (1997: 213) mengungkapkan bahwa: “dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga

akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”. “Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut” (Hamzah, 2008: 9).

Efisiensi mempunyai dua makna yaitu:

- a) kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik.
- b) dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan.

Kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008: 9). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam *Concept Statements* No. 2, mengungkapkan bahwa: “terdapat tiga kategori indikator dalam mengukur kinerja, yaitu (1) *service efforts*, (2) *service accomplishment*, dan (3) hubungan *efforts* dengan *accomplishment*”. Penelitian Perwitasari (2010: 6) menjelaskan bahwa *Service efforts* adalah “bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam”. Lebih lanjut, “*service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu” (Perwitasari, 2010: 6). Berdasarkan GASB (1994: 3) bahwa: “penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara *service efforts* dengan *service accomplishment*”.

Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (2000: 43) mendefinisikan *Efforts* atau usaha sebagai “jumlah sumber daya keuangan dan *non*-keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan

suatu program atau jasa pelayanan”. “Pengukuran *service efforts* meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan *non-keuangan* dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan” (Perwitasari, 2010: 7).

Penelitian yang dilakukan Sadjarto (2000: 43) mengungkapkan bahwa: “ukuran *accomplishment* atau prestasi yaitu *outputs* dan *outcomes*”. *Outputs* mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Sedangkan, *Outcomes* mengukur hasil yang muncul dari penyediaan *output* tersebut. Pengukuran *outcomes* menjadi bermakna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan *outcomes* tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara *efforts* dengan *outputs* dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai” (Sardjiarto, 2000: 44). Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula *explanatory information* atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan, dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah.

Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR (*users*) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara terus-menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa.

Berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.

2.9 Kinerja Manajerial

Menurut Pabundu (2006: 12) “kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”. Menurut Stoner dalam Juniarti dan Evelyne (2003: 22) pengertian “kinerja manajerial yaitu ukuran seberapa efektif dan efisien manajer

telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial adalah suatu kegiatan atau program yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mencapai efektifitas dan efisiensi untuk mendapatkan keluaran atau hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.

Kinerja manajerial merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja keuangan dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja manajerial digunakan sebagai bentuk pengukuran kinerja keuangan karena telah mencakup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan salah satu hal penting dalam sisi kinerja keuangan, hal ini dikarenakan SKPD merupakan satuan unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan belanja daerah.

Pengukuran kinerja dapat ditentukan melalui hal-hal yang menyangkut dengan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal-hal tersebut dapat diukur melalui kinerja manajerial. Kinerja manajerial diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) item. Tingkat kinerja manajerial disetiap bidang yang meliputi:

1. perencanaan
2. investigasi
3. pengkoordinasian
4. evaluasi
5. pengawasan
6. pengaturan staf (*Staffing*)
7. negosiasi

8. perwakilan/representasi
9. kinerja secara keseluruhan.

Tingkat kinerja manajerial tersebut merupakan faktor - faktor yang penting untuk dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan kinerja manajerial. Tingkat manajerial tersebut merupakan perhitungan partisipasi anggaran yang berbasis kinerja serta memiliki bentuk yang efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Merupakan penelitian deskriptif analitik dengan studi korelasi yaitu penelitian untuk merancang serta menentukan tingkat hubungan variabel, dan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel variabel bebas terhadap variabel terikat. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kinerja pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sistem pengutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan variabel bebas sedangkan kinerja pendapatan sebagai variabel terikat

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sedangkan jangka waktu penelitian hingga perampungannya diperkirakan kurang lebih 3 (tiga) bulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari instansi berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden secara langsung yang merupakan data yang belum pernah dipublikasikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui instansi. Untuk mendapatkan data sekunder digunakan:

- a. Dokumen-dokumen instansi yang ada hubungannya dengan penyusunan penulisan ini.
- b. Literatur, yakni jurnal atau buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen (X) dan dependen (Y). Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Hamzah (2008) kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi, yang disimbolkan Y merupakan variabel dependen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data yang diperlukan, penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah akan yang dibahas.
2. Penelitian Lapang (*Field Research*), yaitu pengumpulan data lapang yang diperoleh melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.6 Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana yaitu menganalisis pengaruh sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kinerja pendapatan. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kinerja

pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta.X + \varepsilon_i$$

Dimana:

Y = Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar
 X = Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 β = Koefisien Regresi (Parameter)
 a = Konstanta (Intercept)
 ε_i = Faktor Kesalahan

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan pengujian hipotesis pada koefisien regresi yang diperoleh. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05 atau 5%. Pengujian hipotesis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan dan relevansi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, juga untuk mengetahui lemah atau kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS 21. Pengujian hipotesis secara simultan (Uji-F) dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis Statistik:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) dilakukan dengan menggunakan program SPSS 21 untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial.

Hipotesis Statistik:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan uraian pada bab pembahasan, maka selanjutnya dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Naik turunnya Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar dipengaruhi oleh Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 89 persen.
2. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar.

5.2 Saran

Berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan Kinerja Pendapatan Dispenda Kota Makassar, sebaiknya pihak manajemen Dinas Pendapatan Daerah perlu lebih mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi secara *online* dengan cara memberikan penyuluhan tentang pembayaran secara *online* tersebut.
2. Sebaiknya manajemen Dinas Pendapatan Daerah mengikutsertakan karyawannya untuk diberikan pelatihan tentang cara yang efektif di dalam pemungutan pajak maupun retribusi agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S Ruky. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan dan Prosedur*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar)*. Jakarta: Erlangga.
- Burton, Ricard dan Wirawan B. Illyas. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi III. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia* ed.3. Yogyakarta: Andi.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance measurement is only one way of managing performance*. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502-516.
- Hall. 2001. *Ekonomi Indonesia*, Edisi kedua, Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Ardi 2008, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Konferensi Penelitian, Jatim.
- Handoko TH,. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- <http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 April 2015.
- Ismail, Tjip. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Kusuma., 2013, *Pemrograman PHP CodeIgniter Blackbox*, Jasakom, Jakarta.
- Lazio, Sonny. 2012. *Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Diakses 10 Oktober 2012, dari

[Http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html](http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html).

- Locke, E.A. 1968. *Toward A Theory of Task Motivation and Incentives. Organizational Behavior and Human Performance*. pp: 68-106.
- Lunenburg, C. Fred. 2011. *Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and Performance*. Sam Houston State University, International Journal Of Management, Business, and Administration. Vol. 14. Number 1, 2011.
- Mandell, Lee M. 1997. *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government*. Public Administration Quarterly; Spring 1997; Vol. 21: 96.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat
- Nariana, Siti Khairani dan Ratna Juwita. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi.
- P. Robbins, Stephen. 2008. *Organizational Behaviour*, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh), Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir. Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 59 Tahun 2002 Seri B Nomor: 3.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Yudistisia.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan*. Edisi Pertama Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 28 – 34.
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: "Metodologi Penelitian untuk Bisnis"*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marhot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyanto. 2008. *Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tika, Mohammad Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia* ed.8. Jakarta: Salemba Empat
- Westin, Susan S. 1998. *Performance Measurement and Evaluation Definition and Relationship*. GAO issued May 2005
- Widhi Ardiasyah, Indra. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi III. Yogyakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nursadiqah Apriliani Salam
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 08 April 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : JL. Teduh Bersinar, Komp. Griya Fajar Mas
 blok D no. 18 Makassar
 No. HP : 0822 9386 2360
 Alamat *E-mail* : a31111293@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Islam Athirah Makassar (Tahun 1999 – 2005)
 - b. SMP Negeri 24 Makassar (Tahun 2005 – 2008)
 - c. SMA Negeri 9 Makassar (Tahun 2008 – 2011)
 - d. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin (Tahun 2011-2016)
2. Pendidikan Non Formal/Training/Seminar
 - a. Pelatihan *Basic Study Skill Hasanuddin University* (2011)
 - b. Latihan Kepemimpinan Tingkat Pertama Ikatan Mahasiswa Akuntansi (LK1) (2011)
 - c. *English for Professionals Course Briton International English School* (2015)
 - d. *TOEFL Preparation Course Briton International English School* (2015)

Riwayat Organisasi dan Kerja

1. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Periode 2013-2014)
2. Pengalaman Kerja
 - a. *Decorating Cake Kee's Cake Home Made* Makassar (2012-2016)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 29 Agustus 2016

Nursadiqah Apriliani Salam

LAMPIRAN 2:**KOESIONER PENELITIAN UNTUK RESPONDEN**

Responden yang terhormat

Dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kinerja Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**” dengan ini dimohon kesediaan anda mengisi koesioner berikut ini.

Kerahasiaan identitas anda dari hasil penelitian ini dijamin dan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademik dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Atas kesediaan anda mengisi koesioner ini diucapkan banyak terima kasih.

Peneliti,

Nursadiqah Apriliani Salam

PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilihlah salah satu jawaban dari masing-masing nomor pertanyaan berikut ini. Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia di masing-masing pilihan.
2. Pilihan tersebut hendaknya subjektif mungkin
3. Koesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab dengan baik, karena itu diharap diteliti kembali apakah semua pertanyaan-pertanyaan telah terjawab.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis kelamin
 - a. ☐ Laki-laki
 - b. ☐ Perempuan.
2. Usia anda tahun
3. Pendidikan anda
 - a. ☐ SLTA
 - b. ☐ D-3
 - c. ☐ S-1
 - d. ☐ S-2
4. Agama
 - a. ☐ Islam
 - b. ☐ Kristen Protestan
 - c. ☐ Katolik
 - d. ☐ Hindu
 - e. ☐ Budha
 - f. ☐ Kong Hu Cu.

PERNYATAAN:**Variabel Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (X)**

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar memudahkan masyarakat untuk membayarnya.
 - a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju.
2. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mudah dan tidak memberatkan masyarakat.
 - a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan kinerja pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
 - a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju.
4. Sistem pemungutan pajak yang wewenang pemungutan pajak ada pada Direktorat Pajak yang berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak.
 - a. ☐ Sangat Perhatian
 - b. ☐ Perhatian
 - c. ☐ Cukup Perhatian
 - d. ☐ Tidak Perhatian
 - e. ☐ Sangat Tidak Perhatian.

Variabel Kinerja Pendapatan Dispenda (Y)

5. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melibatkan pegawai Kantor Kecamatan yang ada di Kota Makassar agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
 - a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju
6. Pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan langsung oleh para camat setempat untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.
 - a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju

7. Kinerja pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dikatakan sangat baik karena target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai pada tahun 2014.
- a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju
8. Sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pihak pegawai selalu mengingatkan masyarakat dengan cara memberikan pengumuman melalui pegawai kelurahan setempat.
- a. ☐ Sangat Setuju
 - b. ☐ Setuju
 - c. ☐ Cukup Setuju
 - d. ☐ Tidak Setuju
 - e. ☐ Sangat Tidak Setuju

LAMPIRAN 3:

**TABULASI RESPONDEN UNTUK SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

No	Kode Responden	Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan				Total	Jumlah Rata2
		P1	P2	P3	P4		
1.	TM	5	4	5	4	18	4,50
2.	GH	4	4	5	4	17	4,25
3.	BA	4	4	5	4	17	4,25
4.	NM	5	5	4	3	17	4,25
5.	WA	4	5	4	5	18	4,50
6.	IF	4	4	4	4	16	4,00
7.	AV	4	4	4	4	16	4,00
8.	NG	4	4	4	2	14	3,50
9.	XB	4	4	4	2	14	3,50
10.	AS	5	4	5	4	18	4,50
11.	MD	4	4	4	4	16	4,00
12.	LR	4	4	4	4	16	4,00
13.	ZW	4	4	5	4	17	4,25
14.	ID	5	4	4	5	18	4,50
15.	KD	5	3	4	4	16	4,00
16.	NU	4	4	4	3	15	3,75
17.	QA	5	4	5	4	18	4,50

LAMPIRAN 4:**TABULASI RESPONDEN UNTUK KINERJA PENDAPATAN DISPENDA**

No	Kode Responden	Kinerja				Total	Jumlah Rata2
		P1	P2	P3	P4		
1.	TM	4	4	5	4	17	4,25
2.	GH	5	5	5	5	20	5,00
3.	BA	5	5	5	5	20	5,00
4.	NM	4	4	4	5	17	4,25
5.	WA	4	4	5	5	18	4,50
6.	IF	4	5	4	4	17	4,25
7.	AV	4	4	4	5	17	4,25
8.	NG	4	5	5	5	19	4,75
9.	XB	4	5	5	5	19	4,75
10.	AS	4	4	5	5	18	4,50
11.	MD	4	5	4	4	17	4,25
12.	LR	5	5	4	4	18	4,50
13.	ZW	5	4	4	5	18	4,50
14.	ID	4	5	4	4	17	4,25
15.	KD	4	5	5	4	18	4,50
16.	NU	5	4	4	4	17	4,25
17.	QA	5	5	5	5	20	5,00

LAMPIRAN 5:**DATA REGRESI LINEAR SEDERHANA**

No	Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (X)	Kinerja Pendapatan Dispenda (Y)
1	4,50	4,25
2	4,25	4,00
3	4,25	4,00
4	4,50	4,25
5	4,75	4,50
6	4,50	4,25
7	4,50	4,25
8	5,00	4,75
9	5,00	4,75
10	4,75	4,50
11	4,50	4,25
12	4,75	4,50
13	4,75	4,50
14	4,50	4,25
15	5,00	4,50
16	4,50	4,25
17	5,00	5,00

LAMPIRAN 6:**HASIL OLAH DATA SPSS 21****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Dsipenda	4,3971	,26603	17
Sistem Pemungutan	4,6471	,25092	17

Correlations

		Kinerja Dsipenda	Sistem Pemungutan
Pearson Correlation	Kinerja Dsipenda	1,000	,943
	Sistem Pemungutan	,943	1,000
Sig. (1-tailed)	Kinerja Dsipenda	.	,000
	Sistem Pemungutan	,000	.
N	Kinerja Dsipenda	17	17
	Sistem Pemungutan	17	17

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pemungutan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,943 ^a	,890	,882	,09129

a. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan

b. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,007	1	1,007	120,882	,000 ^b
	Residual	,125	15	,008		
	Total	1,132	16			

a. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

b. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,250	,423		-,591	,564
	Sistem Pemungutan	1,000	,091	,943	10,995	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Kinerja Dsipenda	Predicted Value	Residual
1	,000	4,25	4,2500	,00000
2	,000	4,00	4,0000	,00000
3	,000	4,00	4,0000	,00000
4	,000	4,25	4,2500	,00000
5	,000	4,50	4,5000	,00000
6	,000	4,25	4,2500	,00000
7	,000	4,25	4,2500	,00000
8	,000	4,75	4,7500	,00000
9	,000	4,75	4,7500	,00000
10	,000	4,50	4,5000	,00000
11	,000	4,25	4,2500	,00000
12	,000	4,50	4,5000	,00000
13	,000	4,50	4,5000	,00000
14	,000	4,25	4,2500	,00000
15	-2,739	4,50	4,7500	-,25000
16	,000	4,25	4,2500	,00000
17	2,739	5,00	4,7500	,25000

a. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4,0000	4,7500	4,3971	,25092	17
Std. Predicted Value	-1,582	1,407	,000	1,000	17
Standard Error of Predicted Value	,024	,042	,030	,007	17
Adjusted Predicted Value	4,0000	4,8058	4,3971	,25169	17
Residual	-,25000	,25000	,00000	,08839	17
Std. Residual	-2,739	2,739	,000	,968	17
Stud. Residual	-3,029	3,029	,000	1,071	17
Deleted Residual	-,30580	,30580	,00000	,10812	17
Stud. Deleted Residual	-4,695	4,695	,000	1,660	17
Mahal. Distance	,168	2,504	,941	,938	17
Cook's Distance	,000	1,024	,120	,340	17
Centered Leverage Value	,011	,157	,059	,059	17

a. Dependent Variable: Kinerja Dsipenda

